

## **Perceraian Karena Perbedaan Perspektif Pilihan Politik Teori Konflik di Kabupaten Tangerang**

**Muhil Mubarak**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[portzmoehil14@gmail.com](mailto:portzmoehil14@gmail.com)

### **Abstract:**

Differences in political choices are one of the causes of divorce in Indonesia. As a phenomenon that occurred in Sindang Asih Village, Sindang Jaya District, Tangerang Regency. This article aims to describe and analyze the differences in political choices that result in divorce. This article is the result of doctrinal law research with a sociological approach and a conceptual approach. Source data using interviews and documentation, and data analysis techniques using editing, classification and analysis and conclusions. The results of this study are about the reasons for differences in political choices to be the cause of divorce, First, because one of them tends to adhere to political ideology and always has different understandings with people with different political ideologies, Second, the political kinship factor is that there are married couples who have kinship ties so that the family becomes a factor for the couple in considering political choices, Third, because the wife has a strong social role in the community so that husband and wife both have the same strong power. Meanwhile, the phenomenon of divorce conflict due to differences in political choices according to Ralf Dahrendorf's conflict theory occurs because of inequality between the husband as the Superordinate, namely the authority and power holder, with the wife and the wife's extended family as the Subordinate, namely the party who is depressed due to the authority of the authority and the power holder. Then a conflict group emerges that takes actions that cause changes in the couple's social life based on the intensity of the conflict that occurs.

**Keywords:** divorce; politics; conflict.

### **Abstrak:**

Perbedaan pilihan politik menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian di Indonesia. Sebagaimana fenomena yang terjadi di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pilihan politik yang berakibat pada perceraian. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan konsep. Data narasumber menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data menggunakan cara edit, klasifikasi dan analisis dan kesimpulan. Hasil dari

penelitian ini yaitu tentang alasan perbedaan pilihan politik menjadi penyebab terjadinya perceraian, Pertama, karena salah satu dari mereka cenderung memegang teguh ideologi politik dan selalu berbeda paham dengan orang yang berbeda ideologi politiknya, Kedua, faktor politik kekerabatan yaitu terdapat pasangan suami istri yang memiliki ikatan kekerabatan sehingga keluarga menjadi faktor pasangan tersebut dalam mempertimbangkan pilihan politik, Ketiga, karena sang istri mempunyai peran sosial yang kuat pada lingkungan masyarakat sehingga suami dan istri sama-sama memiliki power yang sama kuat. Sedangkan fenomena konflik perceraian akibat perbedaan pilihan politik menurut teori konflik Ralf Dahrendorf terjadi karena ketimpangan antar pihak suami sebagai Superordinate yakni otoritas dan pemegang kekuasaan, dengan pihak istri dan keluarga besar istri sebagai Subordinate yakni pihak yang tertekan akibat kewenangan otoritas dan pemegang kekuasaan. Maka muncul kelompok konflik yang melakukan tindakan yang menimbulkan perubahan pada kehidupan sosial pasangan tersebut berdasarkan pada intensitas konflik yang terjadi.

**Kata Kunci:** perceraian; politik; konflik.

### **Pendahuluan**

Fenomena kasus perceraian karena perbedaan politik ini terjadi di desa Sindang Asih Sindang Jaya, yaitu pada saat pemilihan kepala desa Sindang Asih. Dalam pemilihan kepala desa, terdapat pasangan yang berbeda dalam memilih calon kepala desa. Perceraian terjadi karena perbedaan pilihan politik yang terjadi pada pasangan Sholeh dan Neng Iroh, dimana Sholeh merupakan calon kepala desa yang mencalonkan diri, namun Neng Iroh dan keluarganya tidak mendukung sang suami, melainkan lebih memilih paman Neng Iroh yang juga mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Perceraian pasangan juga termasuk dorongan dari orang tua dan keluarga besar pasangan, hal ini disebabkan adanya kesalahpahaman di antara orang tua pasangan.<sup>1</sup> Kemudian perceraian karena perbedaan pilihan politik juga terjadi pada pasangan Udin dan Itok. Pasangan tersebut sebelumnya sempat berselisih karena celaan calon kepala desa terpilih, dan hal ini ditanggapi pasangan tersebut Membuat konflik berkepanjangan sehingga perceraian menjadi pilihan mereka.<sup>2</sup> Dan akhirnya terjadi pada pasangan Apid dan Yeyen, perceraian ini sebenarnya berawal dari konflik yang melibatkan orang tua masing-masing yang berbeda dalam pilihan politik dan meminta pasangan untuk mengikuti pilihan politik yang sama seperti orang tua masing-masing pasangan. Sehingga hubungan keluarga memanas dan puncaknya orang tua mereka menyuruh mereka untuk bercerai.<sup>3</sup>

Terkait dengan praktik politisasi di desa Sindang Asih yang sangat fanatik, karena politik selalu dikaitkan dengan setiap elemen masyarakat baik itu kegiatan keagamaan maupun sosial, salah satunya dalam menentukan salat imam di masjid di desa Sindang Asih, dan Dalam berinteraksi antara masyarakat dan kehidupan

---

<sup>1</sup> Sholeh, Interview/, 05 July 2018

<sup>2</sup> Itok, Interview/, June 15, 2018

<sup>3</sup> Apid, Interview/, 16 June 2018

sosial adalah menutup akses jalan alternatif karena pilihan politik yang berbeda.<sup>4</sup> Ini karena pilihan politik sudah menjadi prinsip fundamental, sehingga tidak ada toleransi ketidakpedulian. Bahkan bisa terjadi perceraian karena perbedaan mendasar tersebut, karena salah satunya cenderung menganut ideologi politik dan selalu berbeda dengan orang yang berbeda ideologi politiknya, sehingga tidak jarang terjadi konflik antara suami istri, perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat. pilihan politik. Salah satu pasangan tersebut akan selalu mendukung bahkan tersinggung jika ada pihak yang menyindir atau menyesatkan calon pendukung politik tersebut. Memang perbedaan bukanlah masalah yang fatal bila tidak dijadikan prinsip mendasar dalam hidupnya. Namun akan terjadi konflik berkepanjangan jika perbedaan menjadi prinsip yang mendasar, terutama terkait rumah tangga yang menjadi unit terkecil dalam sistem sosial.<sup>5</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Mengapa perbedaan pilihan politik menjadi penyebab perceraian di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. Bagaimana fenomena perceraian akibat perbedaan pilihan politik di desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang perspektif teori konflik. Artikel ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer, yaitu dua pasangan suami istri yang telah bercerai yaitu Sholeh, Udin, Itok, Neng Iroh, dan Apid. Data Sekunder, Data Sekunder Penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari lain-lain, buku-buku, karya tulis ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Wawancara (interview), dalam hal ini penulis mewawancarai pihak terkait perceraian karena adanya perbedaan pilihan politik. Dengan wawancara tidak terstruktur berarti pertanyaan yang bebas tetapi tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.<sup>7</sup> Dokumentasi, pengumpulan data lapangan dengan cara mencatat, mencatat dan meringkas data yang ditemukan di lokasi penelitian. Dan mendapatkan data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian.<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### **Analisis Perbedaan Pilihan Politik Menjadi Penyebab Perceraian di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang**

Pada umumnya alasan-alasan perceraian disebabkan oleh permasalahan ekonomi, bisa dikarenakan perselingkuhan, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Perceraian dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan yang cukup menurut hukum. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jo pasal 19 peraturan

---

<sup>4</sup> Agus Soleh, Interview/, June 18, 2018.

<sup>5</sup> Syaifuddin Zuhdi, *Conflict management Partner marriage different religious organizations and the implications of Sakinah family*, (Graduate UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 3.

<sup>6</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

<sup>7</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 193.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 217.

pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada pasal ini berisikan alasan-alasan perceraian yang sah dan bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian yakni:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengungkapkan tambahan alasan-alasan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Yang redaksinya juga sama dengan redaksi pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun pada redaksi pasal 116 KHI terdapat tambahan dua poin, yakni: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Sesungguhnya perceraian merupakan alternatif terakhir jika tidak ditemukan solusi lain, menurut Madzhab Syafi'i dalam melaksanakan perceraian harus memiliki alasan yang pasti, Fiqh Syafi'iyah berpendapat bahwa alasan perceraian ialah:

- a. Karena suami tidak mampu memberikan nafkah
- b. Salah satu pihak melakukan zina
- c. Terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami istri (*Syiqaq*)
- d. Karena salah satu pihak tertimpa aib atau cacat fisik.<sup>11</sup>

Dari beberapa alasan-alasan di atas tidak ditemukan bahwa perbedaan pilihan politik sebagai alasan perceraian, namun beberapa alasan yang tercantum dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 KHI dan pendapat Fiqh Syafi'iyah bisa disimpulkan bahwa alasan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudlorotan bagi pihak lain, dan tidak terwujudnya tujuan pernikahan karena merusak keharmonisan rumahtangga. Alasan perceraian sebab perbedaan pilihan politik memang tidak disebutkan secara langsung di pasal 19

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2) Jo pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993),

<sup>11</sup> Nurhayati Zein, *Vaginitis Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iyah*, (Marwah: Jurnal perempuan, Agama dan Gender, UIN Sulthan Syarif Kasim, 2012)

peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 116 KHI ataupun menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah. Namun jika ditinjau kembali alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada poin (h) Jo pasal 116 KHI poin (h) dan pendapat Fiqh Syafi'iyah poin (c), secara tersirat bahwa perbedaan pilihan politik dapat menjadi alasan perceraian karena termasuk dalam kategori alasan perceraian yang dikemukakan pada pasal tersebut, yaitu "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini bisa disimpulkan karena dalam kasus perceraian sebab perbedaan pilihan politik ini juga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antar pasangan suami istri tersebut.

Perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang bisa terjadi perceraian akibat perbedaan yang mendasar tersebut, karena salah satu dari mereka cenderung memegang teguh ideologi politik dan selalu berbeda paham dengan orang yang berbeda ideologi politiknya, sehingga tidak jarang terjadi konflik antara suami istri, perselisihan dan juga pertengkaran akibat berbeda dalam pilihan politik. Karena sang suami berharap semua keluarga besar sang istri juga mendukung penuh dalam pilkades tersebut. Sedangkan sang istri menuntut kebebasan dalam pilihan politiknya, tanpa harus dipaksa memilih pilihan yang sama dengan sang suami. Sehingga Salah satu dari pasangan tersebut akan selalu mendukung dan bahkan tersinggung bila terdapat seseorang yang menyindir atau menjelekkan calon berpolitik yang didukungnya. Hal ini karena masyarakat Desa Sindang Asih sangat alot dalam mempertahankan pilihan politiknya, sehingga sangat kuat memegang teguh ideologi politiknya dibandingkan keharmonisan keluarga atau lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan keharmonisan keluarga. Sesungguhnya perbedaan itu bukanlah suatu masalah yang fatal jika mereka tidak menjadikan prinsip dasar dalam hidupnya. Namun akan terjadi konflik yang berkepanjangan jika perbedaan itu menjadi prinsip dasar, terutama pada sesuatu terkait rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

Koneksi keluarga yang kuat menentukan posisi politik seseorang atau kelompok tertentu. Karena lahirnya seorang pemimpin politik mendapatkan bermacam-macam dukungan dalam bentuk dana ataupun moril psikologis dari keluarga.<sup>12</sup> Sehingga kasus pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Sindang Asih terdapat tiga calon kepala desa yang sama-sama berpeluang memenangkan pilkades karena jumlah pemilih sebanyak 70% merupakan kerabat atau keluarga dari ketiga calon tersebut, banyak dari pasangan suami istri yang berbeda pilihan karena menentukan calon kades dengan ikatan kekerabatan, sang suami memilih H wawing karena memiliki ikatan keluarga, sedangkan sang istri memilih Lurah Tumpang juga karena memiliki ikatan saudara. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keluarga menjadi faktor masyarakat dalam mempertimbangkan pilihan politik ketika dihadapkan dengan kepentingan kekuasaan, sehingga keluarga mampu mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan lain.

---

<sup>12</sup> Dewi Anggariani, *Politik Kekerabatan*, (Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013)

Dari sisi lain juga karena sang istri memiliki peran sosial yang kuat ketika pilkades berlangsung, jika dahulu dalam urusan politik mereka cenderung power less, yakni jika suaminya pilih A maka mereka juga akan mengikuti pilihan sang suami. Sedangkan masalah politik sesungguhnya merupakan ranah publik akan tetapi dalam penelitian ini terjadi pada ranah domestik, sehingga perbedaan politik bagi suami istri terjadi di banyak keluarga. Akan tetapi hanya beberapa yang sampai terjadi perceraian, hal ini disebabkan karena suami dan istri sama-sama memiliki power yang sama kuat sehingga tidak ada yang mau kalah atau ada salah satu yang memang kalah dan memilih cerai.

### **Analisis Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik Perspektif Teori Konflik**

Perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang bisa terjadi perceraian akibat perbedaan yang mendasar tersebut, karena salah satu dari mereka cenderung memegang teguh ideologi politik dan selalu berbeda paham dengan orang yang berbeda ideologi politiknya, sehingga tidak jarang terjadi konflik antara suami istri, perselisihan dan juga pertengkaran akibat berbeda dalam pilihan politik. Karena sang suami berharap semua keluarga besar sang istri juga mendukung penuh dalam pilkades tersebut. Sedangkan sang istri menuntut kebebasan dalam pilihan politiknya, tanpa harus dipaksa memilih pilihan yang sama dengan sang suami. Sehingga Salah satu dari pasangan tersebut akan selalu mendukung dan bahkan tersinggung bila terdapat seseorang yang menyindir atau menjelekkan calon berpolitik yang didukungnya. Hal ini karena masyarakat Desa Sindang Asih sangat alot dalam mempertahankan pilihan politiknya, sehingga sangat kuat memegang teguh ideologi politiknya dibandingkan keharmonisan keluarga atau lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan keharmonisan keluarga. Sesungguhnya perbedaan itu bukanlah suatu masalah yang fatal jika mereka tidak menjadikan prinsip dasar dalam hidupnya. Namun akan terjadi konflik yang berkepanjangan jika perbedaan itu menjadi prinsip dasar, terutama pada sesuatu terkait rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. Sehingga demokrasi itu sangat penting untuk urusan politik, agar tidak menimbulkan kegaduhan politik akibat persaingan yang merugikan masyarakat sekitar terutama pihak-pihak yang dirugikan karena karakter budaya politik yang tidak berdemokrasi. Karena terkait dengan praktek berpolitik di Desa Sindang Asih yang sangat fanatis, dimana politik selalu dikaitkan kepada setiap elemen masyarakat baik itu kegiatan keagamaan ataupun sosial, salah satunya dalam menentukan imam sholat di Masjid kampung Etek sesuai dengan pilihan politik.

Menurut Andik Matulesy seorang pakar Psikologi Politik, fanatisme yang berlebihan merupakan sikap seseorang yang sudah tidak lagi mempunyai rasionalitas dan objektivitas dalam menilai sesuatu. Dalam psikolog sosial gejala mental tersebut dapat dipahami dengan konsep In-group dan Out-group yakni dimana seseorang menganggap A merupakan bagian dari kelompoknya. Maka dia akan mengatakan A adalah baik.<sup>13</sup> Mereka memiliki cara berpikir. Sehingga fanatisme dapat mengakibatkan munculnya konflik diantara para pendukung, karena fanatisme

---

<sup>13</sup> Andik Matulesy, *Psikologi Politik (Dari Ideologi Kebangsaan Hingga Gerakan Mahasiswa)*, (Intrans Publishing, 2005)

dibangun dari ideologi yang menjadi deindividuasi yakni penghilangan identitas diri yang individual mind menjadi collective mind yang dapat menimbulkan tindakan destruktif, emotional, suggestible dan irritable.<sup>14</sup>

Masyarakat Desa Sindang Asih di setiap kampung terutama di kampung Etek merupakan kerabat dan sanak saudara, hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat dahulu yang menikah dengan sesama saudara, tetangga, atau sesama kampung. Sehingga dalam satu kampung memiliki ikatan saudara, walaupun pada silsilah yang panjang. Sedangkan kajian politik yaitu memahami bermacam bentuk dan struktur politik yang berlaku dari kelompok masyarakat pedesaan terutama pada wilayah Desa Sindang Asih. Salah satu yang paling khas dari sistem politik yaitu peran kekerabatan ketika menyusun struktur politik. Politik kekerabatan juga tidak hanya berada pada masyarakat pedesaan namun juga terdapat pada masyarakat perkotaan dan aspek yang paling penting pada kekerabatan yaitu politik keluarga. Keluarga dan politik pada budaya yang umum dikelompokkan pada organisasi sosial. Karena politik dan keluarga mempunyai relasi yang kuat dan saling memberikan pengaruh. Koneksi keluarga yang kuat menentukan posisi politik seseorang atau kelompok tertentu. Karena lahirnya seorang pemimpin politik mendapatkan bermacam-macam dukungan dalam bentuk dana ataupun moril psikologis dari keluarga.<sup>15</sup> Sehingga kasus pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Sindang Asih terdapat tiga calon kepala desa yang sama-sama berpeluang memenangkan pilkades karena jumlah pemilih sebanyak 70% merupakan kerabat atau keluarga dari ketiga calon tersebut, banyak dari pasangan suami istri yang berbeda pilihan karena menentukan calon kades dengan ikatan kekerabatan, sang suami memilih H wawing karena memiliki ikatan keluarga, sedangkan sang istri memilih Lurah Tumpang juga karena memiliki ikatan saudara. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keluarga menjadi faktor masyarakat dalam mempertimbangkan pilihan politik ketika dihadapkan dengan kepentingan kekuasaan, sehingga keluarga mampu mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan lain.

Dari sisi lain juga karena sang istri memiliki peran sosial yang kuat ketika pilkades berlangsung, jika dahulu dalam urusan politik mereka cenderung power less, yakni jika suaminya pilih A maka mereka juga akan mengikuti pilihan sang suami. Sedangkan masalah politik sesungguhnya merupakan ranah publik akan tetapi dalam penelitian ini terjadi pada ranah domestik, sehingga perbedaan politik bagi suami istri terjadi di banyak keluarga. Akan tetapi hanya beberapa yang sampai terjadi perceraian, hal ini disebabkan karena suami dan istri sama-sama memiliki power yang sama kuat sehingga tidak ada yang mau kalah atau ada salah satu yang memang kalah dan memilih cerai. Karena pada umumnya seorang istri memiliki power less dimana dia akan ikut pada pilihan suami dalam berbagai kondisi termasuk pilihan politik sekalipun. Umumnya dalam konteks gender perubahan pada struktur dapat dilihat melalui peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian kerja dan status. Status dapat dilihat dari distribusi kekayaan, pengambil keputusan, penghasilan, kekuasaan dan prestise. sehingga

---

<sup>14</sup>Andik Matulesy, *Psikologi Politik (Dari Ideologi Kebangsaan Hingga Gerakan Mahasiswa)*, (Intrans Publishing, 2005)

<sup>15</sup>Dewi Anggariani, *Politik Kekerabatan*, (Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013)

hubungan politik dengan perempuan juga merupakan alasan terjadinya konflik karena perempuan disana sudah mulai berani terjun ke politik, dan memiliki peran baik dalam rumah tangga maupun dilingkungan masyarakat.

Penelitian ini memakai Teori Konflik Ralf Dahrendorf, agar dapat mengungkap konflik yang mendasari terjadinya perceraian karena alasan berbeda pilihan politik. Menurut Dahrendorf bahwa masyarakat kapanpun pasti akan tunduk kepada proses perubahan sosial, pertengkar dan konflik pasti berperan terhadap sistem sosial, juga bermacam-macam elemen masyarakat berkontribusi pada disintegrasi dan perubahan. Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konsep yang akhirnya dikenal teori konflik dialektika. Dahrendorf kemudian menyampaikan bahwa teori Sosiologi terbagi dua macam yakni teori konsensus dan teori konflik. Teori konsensus mengkaji nilai kesatuan pada kelompok, sedangkan teori konflik mengkaji konflik yang terpenting dan menggunakan kekerasan yang terikat pada masyarakat. Dahrendorf menilai bahwa masyarakat pada kehidupan sosial bisa muncul konflik dan pada sisi lainnya dapat menumbuhkan kerjasama yang baik. Teori konflik Dahrendorf sesungguhnya digunakan untuk sistem sosial umum, pada masyarakat yang selalu berkonflik untuk menuju keteraturan. Namun penulis menggunakan teori Dahrendorf untuk menghubungkan dengan sistem sosial terkecil, yaitu hubungan keluarga yang sudah teratur namun terjadi konflik sehingga diatur kembali menuju keteraturan.

Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat pasti tunduk terhadap proses perubahan. Teoritis konflik lainnya menilai pertentangan dan konflik terjadi pada sistem sosial. Dan berbagai elemen masyarakat juga menyebabkan terjadinya disintegrasi dan perubahan. Teoritis konflik menilai keteraturan yang berada pada masyarakat berasal dari pemaksaan kepada individu oleh kelompok yang berkuasa. Teoritis konflik menegaskan terhadap peran kekuasaan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan menurut ahli bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena perbedaan budaya, berbeda pendirian, berbeda kepentingan ketika perubahan sosial. Maka perubahan sosial juga menjadi penyebab meningkatnya konflik sosial. Perubahan sosial yang meningkat pada masyarakat juga akan menyebabkan perubahan sistem dan nilai yang berlaku pada masyarakat dan mengakibatkan perbedaan pendirian pada masyarakat.<sup>17</sup>

Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat pasti tunduk terhadap proses perubahan. Teoritis konflik lainnya menilai pertentangan dan konflik terjadi pada sistem sosial. Dan berbagai elemen masyarakat juga menyebabkan terjadinya disintegrasi dan perubahan. Teoritis konflik menilai keteraturan yang berada pada masyarakat berasal dari pemaksaan kepada individu oleh kelompok yang berkuasa. Teoritis konflik menegaskan terhadap peran kekuasaan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.<sup>18</sup> Sehingga timbul kelompok-kelompok konflik dan

---

<sup>16</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 153.

<sup>17</sup> Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), 70.

<sup>18</sup> Ralf Dahrendorf, *Class And Class Conflict in Industrial Society*, diterjemahkan Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, 191-193. George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 153. Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, 131.

pertentangan pada masyarakat disebabkan oleh tekanan pemegang kekuasaan dan otoritas tersebut.<sup>19</sup>

**a) Otoritas dalam Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik**

Ralf Dahrendorf menyatakan mengenai konflik sosial sistematis disebabkan oleh perbedaan distribusi otoritas.<sup>20</sup> Masyarakat dalam berbagai posisinya memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak hanya terletak pada posisi akan tetapi juga terletak pada individu. Dahrendorf menyatakan bahwa pada tatanan peran sosial perlu menemukan sumber struktur konflik untuk mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi ditundukkan atau mendominasi. Maka langkah pertama dalam menganalisis konflik yaitu mengidentifikasi berbagai peran otoritas pada masyarakat. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Kelompok yang memiliki posisi otoritas dipastikan mengendalikan bawahan, yaitu kelompok yang berkuasa disebabkan harapan dari individu yang berada di sekitarnya, bukan karena terdapat tanda psikologis kelompok tersebut. Peran otoritas dalam konflik perceraian sebab perbedaan pilihan politik ini terjadi pada pasangan Sholeh dengan Neng Iroh juga kepada pasangan Apid dengan Yeyen dan pasangan Itok dengan Udin. Suami sebagai otoritas yang berkuasa dalam konflik sehingga bercerai. Yang mana semua bermula dari kesalahpahaman antar masing-masing pihak yang berbeda dalam pilihan politik, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi semakin tidak tertib kemudian orangtua pasangan tersebut memperparah dengan mendukung untuk memisahkan dan agar mereka bercerai. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa peran otoritas sepenuhnya dikuasai oleh suami pasangan Udin, Apid dan Sholeh. Mereka yang menduduki posisi otoritas mengendalikan untuk bercerai. Karena otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Secara tidak langsung, peran otoritas dalam perceraian akibat perbedaan pilihan politik melekat pada individu, yakni suami sebagai Superordinat merupakan kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam keluarga. Sedangkan istri sebagai *Subordinate* merupakan pihak yang ditundukkan atau diceraikan. Pada dasarnya sang suami yang berposisi sebagai otoritas bisa mengendalikan sang istri sebagai bawahannya, sebab suami berkuasa bukan karena dasar ciri-ciri psikologisnya melainkan karena harapan orang sekitarnya.<sup>21</sup> Dalam masyarakat selalu terdapat dua kelompok yang saling bertentangan, memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai. Pertentangan tersebut terjadi karena penguasa berusaha mempertahankan status *quo*, sedangkan yang dikuasai berusaha melakukan perubahan. Penguasa akan selalu terancam oleh golongan yang anti status *quonya*, karena pertentangan selalu terdapat dalam struktur dan setiap waktu.<sup>22</sup> Dalam menganalisis sebuah konflik kita harus menentukan penyebab konflik dan pemicu sebuah konflik dan juga peran masing-masing pihak yang berkonflik.

<sup>19</sup>George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 51.

<sup>20</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 154.

<sup>21</sup>George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 155.

<sup>22</sup>Nasrullah Nasir, MS, *Teori-teori Sosiologi*, 25.

**b) Kelompok Konflik Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik**

Kelompok konflik terdiri dari dua kelompok yaitu Kelompok semu (*Quasi Group*) dan kelompok kepentingan (*Interest Group*). Kelompok semu adalah sekumpulan orang yang memegang kekuasaan atau jabatan yang mempunyai kepentingan yang sama. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan juga memiliki struktur, program, tujuan dan anggota yang pasti. Kelompok kepentingan selalu menjadi sumber nyata munculnya konflik pada masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam sebuah konflik juga sangat dipengaruhi oleh kelompok semu dan kelompok kepentingan, bahkan kelompok ini bisa menjadi pemicu terjadinya konflik, dalam kasus perceraian sebab perbedaan pilihan politik yang termasuk dalam kelompok semu adalah suami yakni Udin, Sholeh dan Apid. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kepentingan ialah sang istri yaitu Itok, Neng Iroh, Yeyen dan juga orang tua serta keluarga besar sang istri. Pada pasangan sholeh dan Neng Iroh. Yang mana pada saat itu keluarga besar Neng Iroh tidak memilih Sang Suami pada hak pilihnya walaupun Neng Iroh sendiri memilih sang suami pada pilkades tersebut, hal ini dikarenakan keluarga besar Neng Iroh lebih memilih sang Paman yang juga ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, sehingga terjadilah konflik atas dasar kesalahpahaman antar pihak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sholeh: "*awalna mah sabab nu ngadukung aing ngan pamajikan jeng minantu hungkul, dulur-dulurna mah teu ngadukung aing, cenah moal bakal menang aing mah, kahayang mah kabeh dulur-dulurna milu oge, ken bae lah pegatan geh ja bongan teu nurut percuma oge dipertahanken* (awalnya sebab yang mendukung saya hanya istri dan mertua saja, saudara-saudaranya tidak mendukung saya, katanya saya tidak akan menang, maunya saya semua saudara-saudaranya ikut milih saya juga, biarkan saja cerai juga salahnya tidak manut percuma juga dipertahankan).<sup>24</sup>

Keluarga besar Neng Iroh sendiri merupakan kelompok kepentingan karena berawal dari kelompok semu yang lebih luas, kelompok semu tersebut yakni Sholeh, yang berharap semua dukungan keluarga besar Neng Iroh namun keluarga besarnya lebih memilih H wawing dan tidak mendukung sang suami. karena Sholeh memegang kekuasaan dan dengan kepentingan yang sama sehingga kemudian memilih bercerai sebagai solusinya. Mereka yang termasuk dalam kelompok semu yaitu suami, berharap sang istri mengikuti pilihan politik yang sama, dan untuk Sholeh berharap semua keluarga besar sang istri juga mendukung penuh dalam pilkades tersebut. Akan tetapi menurut mereka yang termasuk kelompok kepentingan yaitu sang istri dan keluarga besar, berharap dalam pemilihan pilkades tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa harus dipaksa memilih pilihan yang sama dengan sang suami.

Konflik dan pertentangan pada perceraian akibat perbedaan pilihan politik ini terjadi karena ketimpangan kelompok *Superordinate* yakni pemegang kekuasaan (suami) terhadap kelompok *Subordinate* yakni istri dan keluarga besar. Berdasarkan data bahwa keinginan dari *Superordinate* yaitu mempertahankan status *quonya*. Akan tetapi pihak *Subordinate* anti terhadap status *quonya*. Sang istri ketika menuntut

<sup>23</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 153.

<sup>24</sup> Sholeh, Wawancara/, 17 April 2019

kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya dianggap telah membantah dan tidak patuh atas perintah sang suami.

Konflik yang terjadi pada pasangan suami istri dikarenakan memiliki perbedaan kepentingan antar kelompok semu (suami) sebagai *Superordinate* yakni pemegang kekuasaan dan otoritas dan kelompok kepentingan atau yang dikuasai sebagai *Subordinate*. Kepentingan sang suami yakni berharap sang istri mengikuti pilihan politik yang sama, dan semua keluarga besar sang istri juga mendukung penuh dalam pilkades tersebut. Sedangkan kepentingan sang istri yaitu berharap dalam pemilihan pilkades tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa harus dipaksa memilih pilihan yang sama dengan sang suami. Konflik pasangan suami istri ini juga menandakan kebenaran pendapat Ralf Dahrendorf bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yakni konsensus dan konflik. Pihak suami sebagai *Superordinate* atau Pemegang kekuasaan dan otoritas, memaksa sang istri untuk memilih pilihan politik yang sama dengannya, dan karena sang istri menilai dalam pilihan politik memiliki kebebasan memilih maka kemudian timbul konflik. Sesuai dengan pendapat Ralf Dahrendorf bahwa masyarakat kapanpun akan tunduk dalam proses perubahan, konflik dan perselisihan dalam sistem sosial. Karena keteraturan pada masyarakat sesungguhnya berasal dari penekanan pihak yang berkuasa untuk menuju perubahan sosial yang lebih tertib.

#### c) Hubungan Konflik dan perubahan Sosial

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf yaitu hubungan konflik dan perubahan sosial. diantaranya adalah dikarenakan perbedaan pendirian, kepentingan yang selalu terjadi dalam kondisi perubahan sosial. Maka peningkatan konflik sosial disebabkan oleh perubahan sosial.<sup>25</sup> Apabila konflik tersebut besar maka perubahan yang terjadi akan radikal. Dan perubahan struktur dapat terjadi secara tiba-tiba apabila konflik tersebut disertai tindakan kekerasan. Maka sosiologi perlu membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan status quo ataupun hubungan antara konflik dan perubahan.<sup>26</sup> Konflik ataupun pertentangan sosial sesungguhnya bisa mengantarkan kepada terbentuknya sebuah perubahan sosial, dan tidak selamanya konflik berdampak buruk. Konflik memang dapat menimbulkan kerusakan kepada masyarakat akan tetapi juga dapat menumbuhkan kekuatan yang konstruktif pada hubungan masyarakat.<sup>27</sup> Maka konflik yang terjadi pada pasangan yang bercerai akibat perbedaan pilihan politik merupakan hal yang lumrah dan wajar, hal ini agar menimbulkan perubahan sosial pasangan tersebut semakin tertata dan berkembang dengan baik.

Konflik karena perubahan sosial ini terjadi pada pasangan suami istri yang bercerai, tidak adanya pihak yang terkait, semua murni karena hubungan sosial suami istri ini di pengaruhi oleh perbedaan pilihan politik yang menjadi prinsip dasar yang harus di pegang tegung dan didukung penuh, akibat dari perbedaan kepentingan ini menjadikan konflik sehingga terjadi perubahan sosial. karenaperubahan sosial dapat mengakibatkan sistem dan nilai yang berlaku berubah.

---

<sup>25</sup> Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, 70.

<sup>26</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 157.

<sup>27</sup> Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, 158

Sehingga hilangnya keharmonisan keluarga, karena salah satu pihak tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, dan juga diantara keduanya tidak sanggup untuk mempertahankan *status quo* nya. Terlebih lagi berlatarbelakang konflik yang memanas dan minset dari istri bahwa suami merupakan orang lain yang bisa terputus ikatannya berbeda dengan kerabat yang tidak akan terputus ikatannya, sehingga keharmonisan keluarga dipertaruhkan dalam konflik pilihan politik yang memang berkaitan dengan hubungan kerabat. Menurut pandangan penulis, bahwa dalam penyelesaian konflik pasangan suami istri yang diakibatkan perbedaan pilihan politik seharusnya diselesaikan dengan baik, karena sejatinya konflik dikelola dengan benar kemungkinan pihak yang bertikai akan menemukan ide yang lebih baik mengenai komunikasi relatifnya dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai. Namun dikarenakan dari kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumahtangganya, setelah penulis melihat berbagai faktor. Apabila dipertahankan maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan, maka dengan bercerai akan menimbulkan perubahan sosial antar keduanya untuk menuju keteraturan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa pembahasan tentang perceraian akibat perbedaan pilihan politik di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: Perceraian akibat perbedaan pilihan politik yaitu *pertama*, karena salah satu dari mereka cenderung memegang teguh ideologi politik dan selalu berbeda paham dengan orang yang berbeda ideologi politiknya. Sehingga tidak jarang terjadi konflik antara suami istri, perselisihan dan juga pertengkaran akibat berbeda dalam pilihan politik. Karena sang suami berharap semua keluarga besar sang istri juga mendukung penuh dalam pilkades tersebut. Sedangkan sang istri menuntut kebebasan dalam pilihan politiknya, tanpa harus dipaksa memilih pilihan yang sama dengan sang suami. *Kedua*, faktor politik kekerabatan yaitu terdapat pasangan suami istri yang memiliki ikatan kekerabatan sehingga keluarga menjadi faktor pasangan tersebut dalam mempertimbangkan pilihan politik. *Ketiga*, karena sang istri mempunyai peran sosial yang kuat pada lingkungan masyarakat sehingga suami dan istri sama-sama memiliki power yang sama kuat sedangkan pada umumnya seorang istri memiliki power less dimana dia akan ikut pada pilihan suami dalam berbagai kondisi termasuk pilihan politik sekalipun.

Konflik yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang yang bercerai akibat perbedaan pilihan politik menurut teori konflik Ralf Dahrendorf bahwa pasangan suami istri tersebut harus dilihat pada segi konflik dan pertentangan yang timbul, tidak hanya dilihat dari integritas atau konsensus yang ada. Pihak yang terlibat dalam konflik menurut Dahrendorf terbagi menjadi dua yakni pertama suami sebagai kelompok semu, sedangkan yang kedua yakni istri dan keluarga besar istri sebagai kelompok kepentingan. Sedangkan konflik perceraian akibat pilihan politik terjadi karena ketimpangan antar pihak suami sebagai *Superordinate* yakni otoritas dan pemegang kekuasaan, dengan pihak istri dan keluarga besar istri sebagai *Subordinate* yakni pihak yang tertekan akibat kewenangan otoritas dan pemegang kekuasaan. Maka muncul kelompok konflik yang melakukan tindakan yang menimbulkan perubahan pada

kehidupan sosial pasangan tersebut berdasarkan pada intensitas konflik yang terjadi. Sehingga perubahan sosial tersebut dapat mengakibatkan sistem dan nilai yang berlaku berubah.

## Daftar Pustaka

### 1. Sumber Buku Penelitian

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Abdullah, Abdul Ghani, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Ahmad, Dadang, 2000. *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Aisyah, Nur, 2013. *Relasi Gender dalam Institusi Keluarga, (Pandangan Teori Sosial dan Feminisme)* (Muwazah: Volume 5, Nomor 2, Desember)
- Al-Haddad, 1993. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh M. Adid Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Ashsofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik Dari Conte Hingga Parson* (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- B.. Sumarni, *Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)*
- Ch, Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press)
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Class And Class Conflict in Industrial Society*, diterjemahkan Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali)
- . *Essays In The Theory Of Society*, (Stanford, Calif.: Stanford University Press)
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Goodman, George Ritzer, Douglas J., 2004. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana)
- Hadi, Sutrisno, 1994. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- Haryanto, Sindung, 2012. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media)
- Kartono, Kartini, 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, (Jakarta: CV. Rajawali)
- Kusnadi, 2002. *Masalah Kerja Sama: Konflik dan kinerja*, (Malang: Taroda)
- Koentjaraningrat, 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Kolip, Elly M. Setiadi dan Usman, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Lauer, Robert H., 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- LKP2M, 2005. *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang)

- Linda L Lindsey, 1990. *Gender Role: a Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall)
- Moleong, Lexy J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Matulesy, Andik. 2005. *Psikologi Politik (Dari Ideologi Kebangsaan Hingga Gerakan Mahasiswa)*, (Jakarta: Intrans Publishing)
- Nasir, Nasrullah, MS, 2009. *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran)
- Nurdin, Fajri M. Kasim, Abidin, 2015. *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Sulawesi: Unimal Press)
- Poloma, Margaret M. 2000., *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: CV. Rajawali)
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007)
- Ritzer, George, 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, (Jogjakrta: Pustaka Pelajar)
- Simanjuntak, PNH., 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. 4* (Jakarta: Djambatan)
- Sinaga, Rudi Salam, 2013. *Pengantar Ilmu Politik: Kerangka Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis, & Policy*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Singarimbun, Irawati, 1989. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES)
- Soekanto, Soerjono, 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta)
- Sugono, Bambang, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada)
- Susanto, Astrid, 2006. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta)
- Susilo, Rachmat K. Dwi, 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media)
- Talib, Sayuti, 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI)
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, t.th)
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas, 1999 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusat)
- Umar, Nazarudin, 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina)
- Usman dkk, Husaini, 2006. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Wahyu, 1986. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional)
- Zeitlin, Irving M., 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press)
- Zuriah, Nurul, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara)

## 2. Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**3. Tesis dan Jurnal Penelitian**

Anggariani, Dewi, *Politik Kekerabatan*, (Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013)

Dlaifurrahman, Muhammad, 2015. *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Heriyono, 2009. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang)

Karyana, Suci, 2012. *Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya*, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Putra, Nanda Trisna, 2012. *Relasi Fadl dalam Surah al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi*, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Roqib, Mohammad, 2017. *Tradisi Pemberian Breget Sebelum Akad Perkawinan Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi di Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)*, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Saputra, Abdurrahman Adi, 2012. *Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Shofiyuddin, Imam Nuril, *Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*,

Syafa'at, Abdul Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Prespektif KH Sahal Mahfudh Tentang AIDS Sebagai Alasan Perceraian*, (Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. VIII, No. 1: 35-57, September 2016, ISSN: 1978-4767)

Zein, Nurhayati, 2012. *Vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iyah*, (Marwah: Jurnal perempuan, Agama dan Gender, UIN Sulthan Syarif Kasim)

Zuhdi, Syaifuddin, 2013. *Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)